

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang senantiasa berusaha meningkatkan pembangunan dari berbagai sektor. Perkembangan pembangunan yang terjadi juga sangat terlihat pada berbagai sektor salah satunya yaitu sektor ekonomi. Upaya peningkatan sektor ekonomi bukan hanya mengandalkan kinerja dari pemerintah, akan tetapi semua lapisan masyarakat juga ikut andil dalam peningkatan sektor ekonomi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kesadaran masyarakat untuk menciptakan berbagai macam jenis usaha.

Saat ini, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia mencapai 59,2 juta (Kementerian UKM dan Koperasi, 2019). Peran dari UMKM yang berdiri saat ini sangat berpengaruh dalam sektor perekonomian di Indonesia, antara lain membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran dan menjadi penopang peningkatan perekonomian di Indonesia. Di Provinsi Jawa Tengah khususnya, penyerapan tenaga kerja mencapai 1.094.944 jiwa pada tahun 2019 dan hampir mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja kurang lebih 13% setiap tahunnya (Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, 2019). Dengan adanya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti mampu mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan (Minarni dan Rahmawati, 2018).

Perkembangan UMKM juga diiringi dengan perkembangan koperasi yang ada di Indonesia. Koperasi memiliki andil sebagai tiang penyangga utama

perekonomian Indonesia. Meskipun koperasi merupakan tiang penyangga utama perekonomian Indonesia akan tetapi prakteknya keadaan koperasi tidak lebih maju daripada usaha lainnya (Zulhartati, 2010). Hal itu dapat disebabkan karena kualitas koperasi yang kurang baik. Di kota Semarang terdapat 86 koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan kesehatan koperasi pada tahun 2018, berikut merupakan hasil dari pemeriksaan kesehatan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah :

Tabel 1.1. Data Kesehatan Koperasi Tahun 2018

Koperasi Sehat	15 Koperasi	17,44 %
Koperasi Cukup Sehat	61 Koperasi	70,93 %
Koperasi Pengawasan Dalam	10 Koperasi	11,62 %

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, 2018.

Koperasi yang termasuk ke dalam kategori koperasi sehat hanya 17,44 % dari 86 koperasi yang telah diperiksa. Hal ini menunjukkan masih ada indikator kesehatan koperasi yang masih belum memenuhi kriteria pada golongan koperasi cukup sehat. Ruang lingkup penilaian tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi meliputi 7 aspek penilaian antara lain permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan koperasi, serta jati diri koperasi (Peraturan M.KUKM No.14 / Per / M.KUKM / XII/2009). Dalam melakukan penilaian kesehatan koperasi dengan menghitung rasio-rasio dari masing-masing aspek. Rasio – rasio tersebut dapat dihitung berdasarkan data dari

laporan keuangan. Oleh sebab itu, setiap koperasi diharuskan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar laporan keuangan yang ada.

Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu badan dikarenakan dapat digunakan sebagai acuan untuk menganalisa kinerja keuangan sehingga dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas yang bermanfaat sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Di koperasi, laporan keuangan memiliki tujuan yaitu sebagai pertanggungjawaban pengurus, menilai prestasi pengurus dan dapat menjadi bahan pertimbangan investor untuk berinvestasi pada koperasi. Oleh sebab itu, kualitas laporan keuangan yang baik harus dimiliki setiap perusahaan tidak terkecuali koperasi.

Penerapan standar akuntansi yang berlaku perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan. Akan tetapi, masalah yang muncul saat ini adalah minimnya kompetensi dari penyusunan laporan keuangan koperasi sesuai dengan SAK ETAP (Purwanti dan Kurniawan, 2013). Penyajian laporan keuangan pada usaha – usaha yang tidak memenuhi standar akuntansi menjadi masalah yang mendasar pada usaha itu sendiri, mengingat pentingnya laporan keuangan untuk kelancaran proses usaha (Achmad dkk, 2019). Unit usaha yang membuat laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku akan berdampak pada perusahaan itu sendiri. Dampak tersebut antara lain tidak mengetahui pasti aset dan kewajiban yang dimiliki perusahaan, tidak memiliki proyeksi bisnis yang baik, serta beresiko terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan. Mengingat sangat pentingnya laporan keuangan bagi

setiap usaha, tentunya perlu adanya dukungan dari beberapa pihak untuk membantu mewujudkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi bagi setiap usaha.

Penyusunan sebuah laporan keuangan yang baik membutuhkan kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan, kerangka ini dimuat dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia contohnya SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diperuntukkan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak membuat laporan keuangan untuk tujuan umum, dan SAK Umum (PSAK-IFRS) berisi aturan umum aturan dan kaidah yang harus dipenuhi pada pembuatan laporan perusahaan. Penggunaan standar akuntansi keuangan pada koperasi menggunakan SAK ETAP dan SAK umum sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 12 tahun 2015 untuk koperasi sektor riil dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 12 tahun 2015 untuk Koperasi Simpan Pinjam konvensional.

Pada tahun 2009 DSAK IAI telah mengesahkan SAK ETAP dan berlaku efektif pada 11 Januari 2011. SAK ETAP ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan entitas yang menerbitkan laporan keuangan usahanya untuk keperluan kegiatan eksternal usahanya. SAK ETAP ini diterbitkan dengan tujuan untuk memudahkan para penggunanya dalam menerapkan prinsip akuntansi yang selama ini masih kurang sesuai apabila menggunakan SAK yang berlaku umum (Dewi dkk, 2017). Menurut Sariningtiyas dan Diah (2011) dalam Pratiwi dan

Hanafi (2016) menyatakan SAK ETAP lebih mudah dipahami dibanding SAK umum, kehadiran SAK ETAP dapat menjadi acuan yang lebih mudah bagi kalangan yang luas dalam menyusun laporan keuangan yang dapat diterima secara umum.

Penerapan SAK ETAP masih sangat rendah karena dianggap memberatkan usaha. Penyebabnya karena pengusaha kecil tidak memiliki pengetahuan akuntansi yang memadai, dan belum mengetahui pentingnya menyusun laporan keuangan bagi kelangsungan usahanya (Pratiwi dan Hanafi, 2016). Selain pemahaman dari pelaku usaha, terdapat beberapa faktor – faktor yang berpengaruh terhadap proses pelaporan keuangan sesuai SAK ETAP. Menurut Oktaritama dan Januarti (2019) tingkat pendidikan, jenjang pendidikan, pemberian informasi dan sosialisasi, masa tugas pekerjaan menjadi faktor – faktor yang mempengaruhi pemahaman SAK ETAP pada koperasi. Sedangkan Menurut Pratiwi dan Hanafi (2016) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi implementasi penerapan SAK ETAP yaitu tingkat pendidikan pemilik, pemahaman teknologi, karakteristik kualitatif laporan keuangan, dan ukuran usaha. Faktor lain yang mempengaruhi implementasi penerapan SAK ETAP pada pelaporan keuangan usaha antara lain sosialisasi, motivasi, kepribadian dan pemahaman (Masitoh dan Widayanti, 2015). Selain itu, hasil penelitian Anisykurilillah dan Rezqika (2019) yang menyebutkan bahwa latar belakang pendidikan, ukuran usaha, umur usaha, pemahaman teknologi informasi dan sosialisasi menjadi faktor yang mempengaruhi pemahaman pelaku usaha terhadap SAK ETAP. Dari beberapa faktor tersebut, latar belakang pendidikan menjadi salah satu faktor yang memiliki

pengaruh besar dalam kesadaran menyusun laporan keuangan bagi usahanya. Sosialisasi standar akuntansi juga menjadi faktor yang penting dalam memberi pemahaman dalam membuat laporan keuangan kepada pelaku usaha. Selain itu, ukuran usaha menjadi penentu bagi suatu usaha dalam kesediaan melaporkan keuangan usahanya tersebut.

Tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang dapat mengubah sikap seorang atau sekelompok orang dalam memperbaiki kinerja dari usahanya. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi mampu meningkatkan kemampuan seseorang dalam menyerap pengetahuan baru. Muniarti (2002) dalam Oktaritama dan Juniarti (2019) menemukan bahwa pengusaha dengan jenjang pendidikan formal yang rendah cenderung tidak memiliki persiapan dan penggunaan informasi akuntansi yang memadai dibandingkan pengusaha yang memiliki pendidikan formal lebih tinggi. Hal ini memungkinkan semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman mengenai Standar Akuntansi Keuangan.

Ukuran usaha menjadi faktor lain yang juga mempengaruhi implementasi SAK ETAP. Ukuran usaha dapat mempengaruhi pemikiran pengusaha terkait dengan kompleksitas dan semakin tingginya tingkat transaksi perusahaan sehingga diharapkan dengan makin besarnya ukuran usaha dapat mendorong seseorang untuk berpikir dan belajar terkait solusi untuk menghadapinya. Menurut Gray et al. (2010) dalam Anisykurlillah dan Rezqika (2019), ukuran perusahaan yang besar berimplikasi perusahaan mempunyai sumber daya yang lebih besar dan juga mampu mempekerjakan karyawan dengan keahlian yang lebih baik.

Sosialisasi standar akuntansi juga menjadi faktor yang mempengaruhi selain tingkat pendidikan dan ukuran usaha. Sosialisasi atau pemberian informasi tentang Standar Akuntansi Keuangan ETAP akan memotivasi bagian akuntansi koperasi untuk mengambil keputusan dalam laporan keuangan sesuai dengan aturan SAK ETAP (Oktaritama dan Juniarti, 2019). Sosialisasi ini dapat menambah pengetahuan bagi pemilik usaha maupun koperasi dan memberikan pengaruh kepada pelaku usaha agar menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi SAK ETAP. Penelitian dari Oktaritama dan Januarti (2019) menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi pemahaman SAK ETAP sedangkan hasil penelitian Pratiwi dan Hanafi (2016) menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap penerapan SAK ETAP. Untuk variabel ukuran perusahaan, penelitian dari Anisykurlillah dan Rezqika (2019) menyatakan ukuran usaha tidak berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi SAK ETAP, sedangkan dalam penelitian Pratiwi dan Hanafi (2016) mendapatkan hasil bahwa ukuran usaha berpengaruh positif terhadap penerapan SAK ETAP. Kemudian untuk variabel sosialisasi standar akuntansi, menurut penelitian Tuti dan Dwijayanti (2014), menyatakan bahwa informasi dan sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman pengusaha dalam menyusun laporan keuangan sesuai SAK ETAP. Sedangkan penelitian Masitoh dan Widayanti (2015), menyatakan sosialisasi SAK ETAP secara parsial berpengaruh terhadap penerapan SAK ETAP.

Dari fenomena yang terjadi dan ditemukannya beberapa perbedaan hasil penelitian terdahulu maka atas dasar tersebut, penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, UKURAN USAHA DAN SOSIALISASI STANDAR AKUNTANSI TERHADAP IMPLEMENTASI SAK ETAP (STUDI KASUS KOPERASI WILAYAH SEMARANG)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi implementasi SAK ETAP pada laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam di wilayah Semarang?
2. Apakah ukuran usaha mempengaruhi implementasi SAK ETAP pada laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam di wilayah Semarang?
3. Apakah sosialisasi standar akuntansi mempengaruhi implementasi SAK ETAP pada laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam di wilayah Semarang?
4. Apakah tingkat pendidikan, ukuran usaha dan sosialisasi standar akuntansi secara simultan mempengaruhi implementasi SAK ETAP di Koperasi Simpan Pinjam wilayah Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, ukuran usaha dan sosialisasi standar akuntansi terhadap implementasi

SAK ETAP pada laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam di wilayah Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan sebagai sarana untuk penerapan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.

2. Bagi Koperasi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi koperasi khususnya dalam bidang akuntansi mengenai implementasi Standar Akuntansi Keuangan dalam penyajian laporan keuangan.

1.5 Sistematika Penelitian

Pembahasan dalam proposal skripsi ini akan disajikan dalam lima bab yang berurutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian digunakan dalam penelitian, berisikan jenis data, sumber data, cara pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil penentuan sampel penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang di anggap perlu dengan berdasar hasil-hasil yang telah dicapai.

